PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN LAHAT SERTA KABUPATEN PEMEKARANNYA (KOTA PAGAR ALAM DAN KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Skripsi Oleh:

PUTRI MARLENI
01091002059
EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2013

S
338.959 807
put
p
2013

Record : 21715
Reg : 22179.

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN LAHAT SERTA KABUPATEN PEMEKARANNYA (KOTA PAGAR ALAM DAN KABUPATEN EMPAT LAWANG)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh:

PUTRI MARLENI
01091002059
EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2013

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN LAHAT SERTA KABUPATEN PEMEKARANNYA (KOTA PAGAR ALAM DAN KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa	: Putri Marleni
NIM	: 01091002059
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 21 juni 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 23 juni 2013

Ketua	Anggota	Anggota
Dr. Azwardi, SE,M.Si	Drs. Nazeli Adnan M.Si	Drs. Komri Yusuf. M.Si
NIP 196805181993031003	NIP 195804171988810102	NIP 195310241980031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Azwardi, SE,M.Si
NIP 196805181993031003

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN LAHAT SERTA KABUPATEN PEMEKARANNYA (KOTA PAGAR ALAM DAN KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Disusun Oleh:

Nama	: Putri Marleni
NIM	: 01091002059
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

TANGGAL 21 MEI 2013

Ketua : _____

Dr. Azwardi, SE,M.Si

NIP 196805181993031003

TANGGAL 21 MEI 2013-05-21

Anggota : _____

Drs. Nazeli Adnan M.Si

NIP 19580417198810102

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Marleni
NIM : 01091002059
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjdul :
Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Lahat Serta Kabupaten Pemekarannya (Kota Pagar Alam Dan Kabupaten Empat Lawang)

Pembimbing :
Ketua : Dr. Azwardi, SE,M.Si
Anggota : Drs. Nazeli Adnan M.Si
TanggalUjian : 21 juni 2013

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini sya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, tanggal bulan tahun

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
A1F0BABF575496734
6000 DJP

Putri Marleni

NIM01091002059

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Lahat Serta Kabupaten Pemekarannya (Kota Pagar Alam Dan Kabupaten Empat Lawang). Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Eronomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tingkat pertumbuhan kabupaten Lahat sebelum pemekaran wilayah tahun 1994-2000 dan setelah pemekaran wilayah tahun 2001-2010 serta membahas tingkat kemandirian fiskal kabupaten Lahat dan kabupaten pemekarannya (Kota Pagar Alam Dan Kabupaten Empat Lawang). Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Azwardi, SE,M.Si ketua jurusa dan Drs. Nazeli Adnan M.Si sekertaris jurusan Ekonomi Pembangunan yang juga selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
3. Orang tua yang sangat saya cintai

Inderalaya, 21 juni 2013

Putri Marleni

ABSTRAK

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN LAHAT SERTA KABUPATEN PEMEKARANNYA (KOTA PAGAR ALAM DAN KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Oleh:
Putri Marleni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten Lahat sebelum pemekaran wilayah yaitu tahun 1994-2000 dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah tahun 2000-2010 serta menganalisis tingkat kemandirian fiskal Kabupaten lahat dan kabupaten pemekarannya (kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDRB Kabupaten Lahat dan PDRB Propinsi Sumatera Selatan tahun 1994-2010 berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha serta data pendapatan daerah kabupaten Lahat, kota Pagar Alam dan kabupaten Empat Lawang periode tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan menggunakan model analisis *Shift Share,* analisis *Loqation Question* serta analisis kemandirian fiskal. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengolahan data adalah *Microsoft Excel.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah yang dilakukan di kabupaten Lahat berdampak positif terhadap laju pertumbuhan sektor PDRB di Kabupaten Lahat. Namun setelah pemekaran wilayah berdasarkan keuangan daerah kemandirian fiskal kabupaten Lahat, kota Pagar Alam dan kabupaten Empat Lawang masih dikategorikan sangat kurang.

Kata kunci: ***Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal, Pemekaran Wilayah***

ABSTRACT

ECONOMIC GROWTH AND FISCAL AUTONOMY OF LAHAT REGENCY AND ITS SPLITTED REGIONS (PAGAR ALAM AND EMPAT LAWANG)

By:

Putri Marleni; Dr. Azwardi, SE.,M.Si; Drs. Nazeli Adnan, M.Si.

This study was aimed at analyzing the economic growth of Lahat city before its regional splitting from the year 1994-2000 and after its regional splitting from the year 2000 to 2010 and analyzing the level of fiscal autonomy of Lahat and its splitted regencies (Pagaralam and Empat Lawang). The data used are secondary data taken from the GDP of Lahat and GDP of South Sumatra province from the year 1994 to 2010 based on the prices prevailing in the business and revenues of Lahat, Pagaralam, and Empat Lawang from the year 2008 to 2012. Quantitative and descriptive qualitative analysis using shift share, location question, and fiscal autonomy were applied to analyze the data. Microsoft Excel was the software used to process the data. The results showed that the regional splitting has made positive impact on the growth rate of GDP in Lahat. However, after the regional splitting, based on fiscal autonomy, Lahat, Pagaralam, and Empat Lawang are still considered very poor.

Keywords: ***Economic Growth, Fiscal Autonomy, Regional Splitting***

Translated from the original document

Hariswan P.J., M.Pd.
Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa	: Putri Marleni
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat /Tanggal Lahir	: Lahat/ 20 Oktober 1991
Agama	: Islam
Status	:
Alamat Rumah (Orangtua)	: Jl. Letnan Alamsyah Selawi No.30 Lahat
Alamat Email	: Putri.marleni@yahoo.co.id
Pendidikan Formal :	
Sekolah Dasar	: SD Muhammadiyah Lahat
SLTP	: SMP Negeri 2 Lahat
SMU	: SMA Negeri 1 Lahat
Pendidikan Non Formal	: -
Pengalaman Organisasi	: HIMEPA

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 131361
TANGGAL : 05 JUL 2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS) ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Perumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Landasan Teori 10

2.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi 11

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 12

2.1.3 Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah 15

2.1.4 Pemekaran Wilayah 17

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 19

2.1.6 Penerimaan Pemerintah Daerah 21

2.1.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 22

2.1.6.2 Dana Perimbangan 24

2.1.6.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 26

2.1.7 Konsep Kemandirian Fiskal 27

2.2 Penelitian Sebelumnya 29

2.3 Kerangka Pemikiran 31

BAB III METODE PENELITIAN 34

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 34

3.2 Jenis dan Sumber Data 34

3.3 Metode Analisis 35

3.3.1 Metode Analisis *Shift Share* 36

3.3.2 Analisis *Location Quotient*s (LQ) 39

3.3.3 Kemandirian Fiskal 40

3.4 Variabel Penelitian 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

4.1 Hasil Penelitian 43

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lahat 43

4.1.2 Sektor unggulan kabupaten lahat 44

4.1.3 Kemandirian Fiskal 45

4.2 Pembahasan 47

4.2.1 Analisis PDRB Kabupaten Lahat Sebelum Pemekaran Wilayah..... 47

4.2.2 Rasio PDRB Kabupaten Lahat dan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Pemekaran Wilayah 50

4.2.3 Analisis Sektor Unggulan Sebelum Pemekaran Wilayah (Analisis *Location Quotient*) 52

4.2.4 Analisis PDRB Kabupaten Lahat Sesudah Pemekaran Wilayah 54

4.2.5 Rasio PDRB Kabupaten Lahat dan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Sesudah Pemekaran Wilayah..... 58

4.2.6 Analisis Sektor Unggulan Sesudah Pemekaran (Analisis *Location Quotient*) 60

4.2.7 Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Lahat 61

4.2.8 Rasio Kemandirian Fiskal Kota Pagar Alam 63

4.2.9 Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Empat Lawang 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 66

5.1 Kesimpulan 66

5.2 Saran 68

DAFTAR TABEL

4.1 PDRB Kabupaten Lahat Sebelum Sebelum Pemekaran Wilayah Tahun 1994-2000 Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah)..... 48

4.2 PDRB Kabupaten Lahat dan Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Pemekaran Wilayah Tahun 1994-2000 50

4.3 *Location Quation* Kabupaten Lahat Dirinci Menurut Sektor Ekonomi Tahun 1994-2000 53

4.4 PDRB Kabupaten Lahat Sesudah Pemekaran Wilayah Periode 2001-2010 Berdasarkan Harga Berlaku (Jutan Rupiah) 54

4.5 Rasio PDRB Kabupaten Lahat dan Provinsi Sumatera Selatan Sesudah Pemekaran Wilayah Tahun 1991-2010 57

4.6 Nilai Location Quation Kabupaten Lahat Dirinci Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2001-2010 60

4.7 Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2008-2012 62

4.8 Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008-2012 63

4.9 Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008-2012 65

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran 33

DAFTAR LAMPIRAN

1. PDRB Kabupaten Lahat Tahun 1994-2010 Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah) 70
2. PDRB Kabupaten Lahat Tahun 2001-2010 Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah) 71
3. Data Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat Periode 2008-2012 (Juta Rupiah) 72
4. Data Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam Periode 2006 - 2012 (Juta Rupiah) 73
5. Data Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang Periode 2008 S.D 2012 (Juta Rupiah) 74
6. Rasio PDRB Kabupaten Lahat dan PDRB Propinsi Sumatera Selatan (Ra, Ri, dan ri) (Juta Rupiah) 75
7. Perhitungan Rasio PDRB Kabupaten Lahat dan PDRB Propinsi Sumatera Selatan (Ra, Ri, dan ri) (Juta Rupiah) 77
8. Nilai Location Quation Kabupaten Lahat Dirinci Menurut Sektor Ekonomi 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi dan otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan telah diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004, yang merupakan payung hukum bagi daerah otonom. Desentralisasi dalam wujudnya sebagai otonomi daerah memberikan sebagian kewenangan pengelolaan urusan publik untuk dilimpahkan pada provinsi dan kabupaten, termasuk pemekaran wilayah dalam usaha mempercepat pembangunan dan perkembangan wilayah (Kaho, 1988: 17).

Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah pusat (Nugroho, 2011: 138). Sehubungan dengan itu membuka kesempatan bagi daerah-daerah untuk melepaskan dari induknya serta secara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

mandiri mengembangkan dan mengelolah sendiri sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

Keputusan mengenai pemekaran daerah baru harus lebih cermat dan bijaksana untuk melakukan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kapasitas yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tergesa-gesa dan cenderung bersifat politis. Apabila hal ini tidak diperhatikan secara serius, maka pemekaran daerah tidak akan memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara makro maupun mikro, tetapi cenderung akan membebani keuangan negara dan masyarakat, karena sosial dan *political cost* suatu pemekaran daerah akan lebih besar jika dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rifdan, 2010: 30).

Salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pemekaran wilayah adalah kabupaten Lahat, seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 yang lalu. Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan pemekaran dengan dibentuknya Kota Otonom, yaitu Pagar Alam pada tingkat kecamatan. Kemudian Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006.

Menurut Hermawati (2007: 14) pemekaran wilayah dimungkinkan apabila ternyata hasil pemekaran tersebut mampu mendorong proses pembangunan disuatu wilayah menjadi lebih efisien. Hal ini berarti dengan otonomi yang diperoleh, masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alamnya

sendiri sehingga diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan dan perkembangan aktivitas perekonomian wilayah.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan manusia baik material maupun spiritual. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan pembangunan ekonomi cenderung mendapat prioritas dari pembangunan lainnya karena pembangunan bidang ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah (Todaro, 2004: 94).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Robinson Tarigan (2004: 10) secara khusus menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi wilayah (daerah) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah (daerah) tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan) (Jhingan, 2000: 10).

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah dan dilihat dari sisi produksi (Mahardini, 2006: 1).

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun) (Badan Pusat Statistik, 2000:8). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*), dan dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik. PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lahat disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu: pertanian, industri, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan (hotel dan restoran), angkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya dan jasa-jasa (BPS, Kabupaten Lahat 2005: 17).

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis *Shift Share* untuk mengukur pertumbuhan kabupaten Lahat dan wilayah pemekarannya, salah satu indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah menggunakan data PDRB untuk setiap wilayah. Selain itu untuk mengetahui sektor-sektor unggulan setiap wilayah

digunakan metode *Location Quetient* sehingga dapat diketahui sektor manakah yang menjadi sektor basis dan apakah terjadi perubahan sektor unggulan di kabupaten Lahat dan wilayah hasil pemekarannya.

Sebelum pemekaran seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Lahat mengalami peningkatan. Kontribusi PDRB di Kabupaten Lahat dari tahun 1994-2000 lebih di dominasi oleh sektor pertanian, yakni di tahun 1994 PDRB sektor pertanian adalah 325.240 juta rupiah hingga mencapai 705.284 juta rupiah di tahun 2000. Sektor pertanian merupakan sektor yang diprioritaskan untuk terus ditingkatkan demi menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Lahat, dan yang memberikan kontribusi terendah pada kabupaten Lahat adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yakni hanya berkisar 10.435 juta rupiah di tahun 1994 dan 24.435 juta rupiah di tahun 2000.

Setelah dilakukan pemekaran pada kabupaten Lahat kontribusi yang di berikan oleh setiap sektor ekonomi juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terutama sektor industri Pertambangan dan Penggalian yang menunjukkan perubahan signifikan setelah diberlakukannya pemekaran wilayah, yaitu peningkatan nilai PDRB dari tahun 2001 sebesar 578.985 juta rupiah menjadi 1.854.579 juta rupiah pada tahun 2010, nilai ini dapat menggeser peran sektor pertanian yang sebelumnya sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lahat.

Kota Pagar Alam dan kabupaten Empat Lawang yang merupakan wilayah hasil pemekaran kabupaten Lahat diharapkan memiliki kemandirian dalam

melaksanakan pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunannya. Terutama dari segi tingkat kemandirian fiskal daerah masing-masing, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembanguan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Lahat serta Kabupaten Pemekarannya ".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kabupaten Lahat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah?
2. Apakah terjadi perubahan sektor-sektor unggulan di kabupaten Lahat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah ?
3. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal kabupaten Lahat dan kabupaten pemekarannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten Lahat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah.
2. Untuk menganalisis perubahan sektor-sektor unggulan di kabupaten Lahat sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah.
3. Menganalisis tingkat kemandirian fiskal Kabupaten lahat dan kabupaten pemekarannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain menjawab permasalahan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat berguna dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal kabupaten lahat dan kabupaten pemekarannya.
2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepenting. Salah satunya sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah kabupten Lahat dan kabupaten pemekarannya untuk menyusun sebagai program guna meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini berisi landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal di kabupaten Lahat dan kabupaten pemekarannya (kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang), penelitian terdahulu dan selain itu juga terdapat kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini terdiri dari Ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis dan variabel penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan hasil penelitian.

Bab V Penutup: kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2000. *PDRB Kabupaten Lahat Menurut Lapangan Usaha*. BPS Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat.

Badan Pusat Statistik. 2005. *PDRB Kabupaten Lahat Menurut Lapangan Usaha*. BPS Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat.

Badan Pusat Statistik. 2010. *PDRB Kabupaten Lahat Menurut Lapangan Usaha*. BPS Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat.

Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. 8: 9*

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: PT.Macanan Jaya Cemerlang.

Fisipol UGM, Balitbang Depdagri RI, 1992. Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, *Laporan Akhir Penelitian*, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Hermawati, Ricca. 2007. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah : Analisis Kasus Provinsi Sumatera Selatan *[Skripsi]*. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Bogor.

Jhingan,M.L.2000. *Ekononomi Pembangunan dan perencanaan.* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Kaho, Josef R. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers

Mahardini, Anggi. 2006. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Barat Periode Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Wilayah *[Skripsi]*. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Bogor.

Nugroho, Kandung Sapto. 2011. "Pemekaran Daerah, Dapatkah Menjadi Model Pemerataan Pembangunan? (Kasus Pemekaran Di Provinsi Banten)" [online]. *Jurnal Media Ekonomi.* 14 : 165-175.

Nurcholis, Chanif dan Ace Sriati Rachman. 2011. "Kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah Kasus Kota Depok" [online]. *Jurnal Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah.* 27: 259.

Pambudi, Septian Bagus. 2008. "Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat". *Media Ekonomi.* 14: 167-170.

Ratnawati, Tri. 2010. "Satu dasa warsa pemekaran daerah era Reformasi: kegagalan otonomi daerah" [online]. *Jurnal Ilmu Politik.* 21: 127.

Rifdan. 2010. "implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur" [online]. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.* 1: 30-31.

Saragih, Juli Panglima. 2003. " *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sasana, Hadi. 2006. "Analisis Kemandirian Fiskal Dilihat Dari Sektor-Sektor Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)" [online]. *Jurnal Administrasi Publik.* 1: 115-116.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke – 2. Indonesia.* Kencana Prenada Media Group.

Suparnoko, M. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah.* Yogyakarta : Andi Offset

Tarigan, Robinson. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tim Redaksi Fokus Media.2008. *Undang–Undang Otonomi Daerah 2008.* Bandung : Fokus Media.

Todaro, M. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Haris Munandar [Penerjemah]. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2009. Jakarta

http:// www.djpk.depkeu.go.id (diakses pada tanggal 23 januari 2013 pukul 20:15)

http://www.lahatkab.go.id (diakses pada tanggal 23 april 2013 pukul 12:36)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN